

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

2	0	2	2
---	---	---	---



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pembebasan Lahan Masih di Bawah 50 Persen

Pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Sunter di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur belum rampung.

Lorah Cipinang Melayu Arroyantoro mengatakan hingga kini proses pembebasan lahan warga di RW 04 dan RW 03 belum mencapai 50 persen dari target.

"Masih di bawah 50 persen. Ada yang sudah dilakukan pembebasan dan dibayarkan (uang ganti rugi), tapi ada yang belum," kata Arroyantoro di Jakarta Timur, Rabu (29/6/2022).

Pembebasan lahan ini melibatkan tim gabungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur, pihak Kelurahan, Kecamatan, hingga Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Namun untuk proses ganti rugi pembayaran bidang lahan warga yang terdampak seluruhnya menggunakan anggaran dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

"Bidang lahan di RW 04 sudah ada yang dibebaskan. Bagian yang dekat jembatan merah juga belum dibebaskan. Untuk di RW 03 masih dalam proses pembuatan peta bidang," ujarnya.

Proyek normalisasi Kali Sunter yang sempat terhenti pada tahun 2014 ini diharapkan dapat menyelesaikan banjir luapan Kali Sunter di permukiman warga Cipinang Melayu.

Pasalnya hingga kini wilayah RW 03

dan RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu masih terdampak banjir luapan Kali Sunter, paling anyar pada Rabu (29/6/2022) saat debit air naik.

Sementara itu Ketua RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu, Lukman Suprapto menuturkan akibat tinggi muka air mencapai siaga 1 permukiman warganya terendam banjir sekitar 50 sentimeter.

"Ketinggian kurang lebih 50 sentimeter yang di RT 10. Air mulai masuk jam 02.00 WIB, surut total jam 07.30 WIB. Di RW 03 belum ada pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Sunter," tutur Lukman.

Lukman memastikan warganya mendukung normalisasi Kali Sunter yang merupakan proyek gabungan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Warga kami yang jelas taat peraturan. Buktiinya warga kami sudah menumpuk (menyerahkan) berkas sampai empat kali. Dan berkas tersebut emang untuk kepentingan normalisasi," lanjut dia.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, alasan pembebasan lahan proyek normalisasi mandek karena masalah tanah di bantaran sungai yang akan dinormalisasi.

Dia menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta harus berhati-hati karena pembebasan tanah sering menjadi masalah di kemudian hari.

"Pembebasan (lahan) itu bukan batal, tapi tertunda karena masalah tanah, ini harus lebih teliti," kata Riza beberapa waktu lalu. (TribunJakarta/Kompas.com)

